



SUMBER BERITA

SENIN, 3 SEPTEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Bendahara dan Pejabat SPM Diperiksa

BENGKULU, BE - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, gencar melakukan penyidikan atas dugaan perkara korupsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Air Limbah di Bengkulu Utara, senilai Rp 500 juta. Kemarin (31/8), dua orang saksi kembali diperiksa. Terperiksa pejabat yang mengelu-

arkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nurhayani dan Bendahara, Nihan. Mereka dicecar penyidik seputar mekanisme pembayaran berkenaan perancangan raperda tersebut. "Ya, hari ini (kemarin, red), kita kembali memeriksa dua orang saksi yang mengetahui kasus ini. Pemeriksaan terus kita lakukan pada Senin depan," ujar

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Hendri Nainggolan SH MH saat diwawancarai BE kemarin (31/8). Dengan telah diperiksanya dua saksi kemarin, total saksi yang sudah dimintai keterangan sejak perkara itu dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan mencapai 8 orang saksi. Enam orang saksi

lainnya sebelum sudah dimintai keterangan. Mereka Egi Yuniarto selaku Ketua Tim Teknis, H. Husni selaku Sekretaris Tim Teknis, dan anggota tim teknis masing-masing, Rosdiana, Sri Suji Astuti, dan Sri Monlati. Kemudian seorang saksi lagi yakni berasal dari tim akademisi Tri Andika. Se jauh ini penyidik memang su-

dah meningkatkan status perkara ini ke tingkat penyidikan. Informasinya penyidik segera menetapkan tersangka perkara ini. Dari proses penyelidikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyidik menemukan indikasi yang cukup kuat proses penyusunan raperda itu tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran itu, diantaranya

dalam proses lelang dimenangkan oleh PT. SKA, tetapi dalam realisasi pelaksanaannya malah tidak dikerjakan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR. (529)